

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Peinina Ireine Nindatu

Program Studi Agribisnis, Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau Halmahera Barat,
Indonesia

irennindatu@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari komunikasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu kebijakan strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah yaitu melalui pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah terutama petani, nelayan, usaha kecil menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan penulisan makalah yaitu untuk mengkaji pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk komunikasi pembangunan untuk pengentasan kemiskinan. Metode penulisan yang digunakan yaitu melakukan kajian literatur dari berbagai jurnal yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat, buku dan data sekunder. Hasil kajian menyimpulkan bahwa berbagai kegiatan pemberdayaan telah memberdayakan masyarakat miskin dan membentuk kemandirian sehingga masyarakat dapat menolong dirinya sendiri serta memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Strategi pemberdayaan yang digunakan berbasis partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pencapaian hasil. Selain itu, berbasis entrepreneurship dan penguatan potensi sumber daya alam lokal. Pemberdayaan juga melibatkan perempuan dan *stakeholder* dalam masyarakat yaitu pemerintah daerah, perguruan tinggi, pemerintah desa dan pihak swasta.

Kata kunci: Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

COMMUNICATION OF DEVELOPMENT THROUGH COMMUNITY EMPOWERMENT FOR POVERTY ALLEVIATION

Abstract

Community empowerment is part of development communication oriented to improving the quality of people's lives. One of the poverty alleviation strategy policies implemented by the government is through the empowerment of low-income people, especially farmers, fishermen, small and medium-sized businesses and low-income people. The purpose of writing a paper is to examine the implementation of community empowerment as a form of development communication for poverty alleviation. The writing method used is to study literature from various journals that are relevant to community empowerment, books and secondary data. The results of the study concluded that various empowerment activities have empowered the poor and

formed self-reliance so that the community can help themselves and improve a better life. The empowerment strategy used is based on community participation in planning, implementing, monitoring and evaluating and achieving results. In addition, based on entrepreneurship and strengthening the potential of local natural resources. Empowerment also involves women and stakeholders in the community, namely local governments, universities, village governments and the private sector.

Keywords: Community Empowerment, Poverty, Women

PENDAHULUAN

Dominasi ekonomi telah mendorong penguatan ekonomi pada pihak yang kuat. Akibatnya persaingan semakin ketat, terjadi kesenjangan sosial, dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terpuruk. Upaya mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial semakin sulit. Pengentasan kemiskinan cenderung dilakukan melalui pemberian bantuan.

Akibatnya masyarakat semakin malas bekerja, pengangguran semakin meningkat, tidak mampu melakukan kompetisi, ketergantungan kepada pihak lain sehingga kemandirian dan kesejahteraan sulit diwujudkan (Nugroho 2005).

Kesejahteraan wajib diperoleh semua warga negara seperti diamanatkan oleh UUD 1945, sehingga pemerintah bersama masyarakat perlu bekerjasama untuk mengentaskan kemiskinan. Akar penyebab kemiskinan rumahtangga miskin pada tipologi kemiskinan perkotaan dan perdesaan, menurut Papilaya (2006) yaitu: kurang produktifnya perilaku rumah tangga miskin, kurang normatifnya perilaku elitis, lemahnya kepribadian rumahtangga miskin, memudarnya sistem nilai budaya, kuatnya kepentingan elitis, ketimpangan infrastruktur; persaingan yang tidak adil, dan deprivasi kapabilitas aset produksi. Sedangkan menurut Rofiq

(2014), beberapa hal yang menyebabkan anggaran negara kurang efektif dalam mengatasi kemiskinan yaitu: rendahnya efektivitas belanja sosial dalam mengatasi kemiskinan, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) kemiskinan belum efektif, keterlambatan pencairan anggaran, pengelolaan inflasi yang berpengaruh terhadap naik turunnya angka kemiskinan.

Salah satu arah kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan yaitu dengan bantuan pemberdayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan terutama petani, nelayan, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Upaya tersebut dapat dicapai dengan strategi meliputi: 1). Koordinasi lokasi redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan progam pemberdayaan masyarakat; 2). Pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian; 3). Pembentukan dan penguatan lembaga keuangan mikro; dan 4). Membangun koneksi antara usaha petani, dan UKM dengan dunia industri (RPJMN 2015-2019). Pengentasan kemiskinan pada hakekatnya adalah mengubah perilaku masyarakat. Masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya secara mandiri dan berdaya saing melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari komunikasi pembangunan. Mengacu pada van de Fliert (2014), yang menjelaskan fungsi komunikasi pembangunan yaitu komunikasi kebijakan, komunikasi pendidikan, komunikasi hubungan masyarakat dan strategi komunikasi, komunikasi advokasi dan komunikasi organisasi, maka fungsi-fungsi tersebut dilakukan untuk penguatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Komunikasi menjadi salah satu unsur penting untuk penyampaian pesan-pesan pembangunan secara efektif kepada masyarakat. Komunikasi pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pembangunan kepada masyarakat (Hadiyanto 2014). Hal ini dimaksudkan agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan berpusat pada rakyat (*people centered development*) yaitu bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat (Mardikanto 2010).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membuat masyarakat berdaya dan mandiri. Bentuk pemberdayaan masyarakat perlu disesuaikan dengan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat setempat. Pemberdayaan sangat jauh dengan bentuk-bentuk pembangunan yang cenderung *top down*. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat. Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dari kegiatan pemberdayaan diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk

miskin, sehingga masyarakat dapat memiliki sebuah kehidupan yang lebih baik.

Tujuan penulisan makalah ini, yaitu mengkaji pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk komunikasi pembangunan untuk pengetasan kemiskinan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Istilah pemberdayaan populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan dalam aspek pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan dan aspek lain. Pemberdayaan (*empowerment*) berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Hal ini sering identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkan. Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan kepada pihak yang lemah. Menurut Ife (1995), pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depannya, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat agar mandiri. Upaya tersebut

merupakan sebuah tahapan proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata *output* dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan individu dan masyarakat.

Semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses pemberdayaan, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Suharto dalam Anwas (2013), menjelaskan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan.
2. Pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah dan potensi sasaran.
3. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan.
4. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya dan kearifan lokal masyarakat.
5. Pemberdayaan merupakan proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
6. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, dan berkesinambungan.
7. Pemberdayaan perlu dilakukan secara holistik.
8. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak

kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.

9. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar dan belajar sambil bekerja (*learning by doing*).
10. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya.
11. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat.
12. Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.
13. Agen pemberdayaan perlu memiliki kompetensi yang cukup, dinamis, fleksibel dan bertindak.
14. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, pengusaha, LSM dan perguruan tinggi.

STRATEGI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Menurut Suharto (Anwas 2013) pemberdayaan dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Pemukiman; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
3. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat.
4. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan

peran dan tugas-tugas kehidupannya.

5. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Hasil penelitian Papilaya (2006) menunjukkan bahwa salah satu strategi utama penanggulangan kemiskinan dan pemiskinan yaitu melalui pemberdayaan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi rakyat. disamping strategi lain yaitu: 1) Pelembagaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), 2) Peningkatan kapabilitas, 3) Revitalisasi modal sosial, 4) Advokasi kebijakan publik, 5) Keterjaminan sosial, dan 6) Redistribusi aset produksi.

Mengacu pada Sumodiningrat (1999), maka pemberdayaan masyarakat dinilai berhasil jika dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pada suatu daerah. Hal tersebut dapat diukur melalui adanya 1) peningkatan pendapatan, 2) peningkatan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya, 3) peningkatan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, kuatnya permodalan, 4) peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan, ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Mudiyono *et al* (2005) menjelaskan, cara memberdayakan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui berbagai tingkatan kelompok sasaran, mulai dari tingkat individu

sampai dengan tingkat komunitas seperti berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat miskin bertumpu pada komunitas masyarakat secara umum. Pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan tanpa melihat penduduk atau keluarga miskin satu per satu tetapi dilihat sebagai satu kesatuan komunitas, dengan asumsi jika kesatuan komunitas masyarakat tersebut berkembang maka masyarakat miskin didalamnya juga ikut terentaskan.
2. Pemberdayaan masyarakat miskin bertumpu pada komunitas dengan prioritas; pemberdayaan ini adalah pemberdayaan komunitas masyarakat dengan tetap menempatkan penduduk atau keluarga miskin dalam program pemberdayaan pada lingkup komunitas masyarakat tersebut, dengan memberikan prioritas tertentu kepada penduduk atau keluarga miskin sesuai dengan kondisinya.
3. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengelompokan masyarakat miskin berdasarkan hubungan sosial, kondisi dan penyebab kemiskinannya. Dilakukan program-program pemberdayaan khusus sesuai dengan kondisi dan penyebab kemiskinan masing-masing keluarga.
4. Pemberdayaan masyarakat miskin bertumpu pada keluarga. Setiap keluarga miskin dilakukan pemberdayaan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi dan penyebab kemiskinan masing-masing keluarga.
5. Pemberdayaan masyarakat bertumpu pada individu anggota keluarga. Pemberdayaan ini ditekankan pada

anggota keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bersangkutan, sehingga akan menjadi penggerak pemberdayaan keluarga.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan digolongkan ke dalam 4 jenis. Kemiskinan absolute merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, mulai dari pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi, dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan struktural adalah kondisi miskin yang disebabkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan kultural terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin (Anwas 2013). Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut adalah mereka yang hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1 per hari.

Secara singkat, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat (Suparlan 1993). Menurut Sajogyo dalam Papilaya (2006) mereka yang

disebut miskin kalau pengeluarannya kurang dari 320 kg beras di desa dan kurang dari 480 kg beras di kota tiap tahun tiap jiwa. Pembatasan garis kemiskinan tersebut masih terbatas pada pemenuhan pangan, belum memperhitungkan kebutuhan lainnya.

Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Whiting dalam Anwas (2013), komunikasi memiliki peran penting dalam konteks pembangunan dan perubahan sosial. Komunikasi dalam pemberdayaan diarahkan untuk membangkitkan motivasi dan potensi yang dimiliki setiap anggota masyarakat agar bangkit dan mampu berdaya untuk mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Komunikasi dalam pemberdayaan hanya akan efektif jika dilakukan secara dialogis, interaktif dalam suasana harmonis dan kekeluargaan.

Fungsi proses komunikasi secara dialogis dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Media penyampaian informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pemberdayaan.
2. Wadah partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
3. Media untuk memahami tentang masyarakat dengan berbagai karakteristiknya, kebutuhan dan budayanya.
4. Membangun kesadaran masyarakat tentang potensi dirinya.
5. Wahana untuk bersama-sama aktif melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan secara dialogis, demokratis dan partisipatif
6. Wahana pemeliharaan budaya lokal sebagai jati diri bangsa yang memiliki karakter dan bermartabat.

Komunikasi pembangunan muncul dari pandangan bahwa pembangunan sebagai pemberdayaan dan komunikasi sebagai berbagi makna bersama. Hal ini melibatkan isu-isu di semua tingkat kepentingan: akar rumput, lokal, nasional, dan global.

Fungsi komunikasi dalam komunikasi pembangunan (van de Fliert 2014) adalah:

1. Komunikasi kebijakan, fungsi ini sebagian besar digunakan oleh pemerintah, organisasi pembangunan dan badan pendanaan, serta berfungsi untuk membuat peraturan dan kebijakan agar diketahui masyarakat umum. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui apa kewajiban dan haknya, serta fungsi ini menjadi landasan untuk pemberdayaan.
2. Komunikasi pendidikan, fungsi ini berisi ketentuan informasi pada ide dan teknologi baru termasuk berkontribusi pada peluang-peluang untuk keterampilan berlatih. Hal ini sering membantu membangun kapasitas dan perubahan perilaku dan dapat juga berkontribusi pada pemberdayaan dimana pengetahuan sebagai kekuatan.
3. Hubungan masyarakat dan strategi komunikasi, fungsi ini digunakan untuk menunjukkan pada dunia luar agar mengetahui tentang sebuah organisasi atau gagasan untuk meningkatkan kesadaran dan memperoleh dukungan. Dukungan ini dalam bentuk komitmen keuangan oleh agen pendanaan atau pendonor swasta atau institusi, administratif atau tokoh publik pendukung yang memungkinkan kegiatan tersebut terjadi.
4. Komunikasi advokasi, fungsi ini menyiratkan lobi untuk hak

kelompok atau individu tertentu, dimana perhatian terhadap kondisi buruk masyarakat atau untuk perubahan dalam kebijakan. Hal ini juga dapat mendorong aksi kolektif dan proses akhir dari komunikasi advokasi, yang menyediakan sebuah pengalaman dengan kekuatan penuh yang mendorong pemberdayaan.

5. Komunikasi organisasi, fungsi ini membantu tujuan koordinasi oleh penetapan informasi dan umpan balik sistem dalam sebuah organisasi atau proyek dan seluruh *stakeholder* mengetahui apa yang direncanakan, isu-isu dan perjanjian yang memiliki peluang untuk mengekspresikan pandangan mereka. Monitoring partisipatori dan sistem evaluasi dapat membantu operasional fungsi ini.

METODE

Metode yang digunakan untuk penulisan makalah ini yaitu melakukan kajian literatur dari berbagai jurnal yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat dan kemiskinan, buku dan data sekunder, selanjutnya dideskripsikan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, sebagaimana terdapat dalam RPJMN 2015-2019. Hal tersebut dapat disimak dalam program Indonesia Kerja untuk peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yaitu: 1) Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan; 2) Mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan; 3)

Memberdayakan masyarakat desa atau masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah dan SDA termasuk pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang berkelanjutan; 4) Memperkuat partisipasi kelompok atau lembaga masyarakat desa termasuk perempuan dan pemuda dalam pembangunan desa; 5) Meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan IPTEK dan teknologi tepat guna.

Melalui pemberdayaan, masyarakat diharapkan akan memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemauan untuk merubah hidupnya agar lebih baik dan menciptakan kemandirian. Agar kegiatan pemberdayaan dapat berhasil, maka perlu dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip pemberdayaan yaitu pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat.

Pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif telah menunjukkan keberhasilan (Nugroho 2005). Beberapa contoh pemberdayaan masyarakat di negara lain menunjukkan hasil yang positif. Misalnya kegiatan yang dilakukan melalui pinjaman modal usaha oleh Grameen Bank di Bangladesh dengan memberikan pinjaman kredit kecil kepada kelompok masyarakat yang beranggotakan 10 warga, sebesar Rp. 1.000.000. Pinjaman dengan sistem pengembalian disertai bunga. Kelompok masyarakat setempat menggunakan modal pinjaman untuk usaha mebel dan kuliner. Antara tahun 1988 dan 1994, Grameen Bank telah dengan cepat berkembang di Bangladesh. Jumlah cabang meningkat dari 500 menjadi lebih dari dua kali lipat dan terdapat pada 35.000 desa.

Kelompok masyarakat dapat meningkatkan pendapatan keluarga sebesar 200 persen dalam setahun, menabung dan berinvestasi pada usaha kecil dan membuka lapangan pekerjaan kepada orang lain.

Keberhasilan lain yang telah dicapai yaitu, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan organisasi pekerja perempuan (SEWA) di India pada tahun 1972 dengan beranggotakan 50.000 perempuan. Organisasi ini didirikan untuk persatuan perempuan pekerja mandiri. Kegiatan yang dilakukan yaitu SEWA-Bank, digunakan sebagai sarana bagi perempuan untuk memperoleh kredit, menjamin pelayanan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. Usaha-usaha tersebut berkembang dan mendapat respons organisasi perempuan di India.

Pada tahun 1995, sekitar 7.000 anggota SEWA memperoleh jaminan terhadap kerusakan harta benda terutama sarana produksi mereka yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat miskin dalam pemberantasan kemiskinan merupakan kunci sukses utama. Metode yang dikembangkan harus benar-benar sesuai dengan kultur sosial dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan dilakukan melalui dialog intensif.

Di Indonesia, contoh keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan yaitu melalui Program Ketahanan Pangan Terpadu di Flores dengan menggunakan metode ZOPP (*Ziel Orientierte Project Planning*) yaitu perencanaan proyek yang berorientasi tujuan. Sasaran program ini adalah petani miskin. Metode ini telah banyak dilakukan di negara-negara

berkembang. ZOOP melibatkan masyarakat pada diskusi awal, penentuan kegiatan, tahap perencanaan, implementasi, pemeliharaan dan didampingi oleh motivator. Hingga tahun 1993 sebanyak 850 Ha tanah kritis telah diubah menjadi tanah terasering dengan tanaman pertanian termasuk buah-buahan. Lebih dari 900 perempuan mempunyai warung hidup kebun sayur di pekarangan.

Kegiatan ini berkembang dengan pembangunan sistem air bersih, tempat mandi, cuci dan kakus oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat nelayan mendirikan bengkel perahu yang diorganisir sendiri secara mandiri dan mereka bisa memperoleh kredit perbaikan serta memodernkan alat-alat penangkap ikan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dari perencanaan sangat penting sehingga terdapat kesesuaian antara kebutuhan dan kesuksesan program yang dilakukan.

Pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan perempuan yang telah diberdayakan dapat menunjang ekonomi keluarga dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan.

Hasil penelitian Zein (2006) tentang peningkatan ekonomi rumah tangga nelayan melalui pemberdayaan wanita nelayan, menunjukkan wanita nelayan di pesisir pantai mempunyai peranan yang cukup besar dalam menunjang ekonomi rumah tangga

nelayan. Terdapat kurang lebih 27 persen wanita nelayan mempunyai kegiatan ekonomi produktif untuk membantu ekonomi rumah tangga, dari jumlah tersebut mampu menyumbangkan pendapatan sebesar 7, 23 persen dari total pendapatan rumah tangga. Pemberdayaan perempuan melalui sosial *entrepreneurship*, studi kasus pada koperasi *entrepreneurship* perempuan di India menunjukkan kewirausahaan kolektif telah memberdayakan perempuan dalam tiga hal: keamanan ekonomi, pengembangan perilaku kewirausahaan, dan peningkatan kontribusi kepada keluarga (Data *et al* 2012).

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan salah satu prinsip pemberdayaan dimana sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian (Suharto dalam Anwas 2013). Sebagaimana dijelaskan oleh Sunarya *et al* (2011), bahwa keuntungan menjadi seorang pengusaha yaitu terbuka peluang utk mengeksplorasi potensi diri secara penuh, mendapat peluang mencapai tujuan yang diinginkan dan peluang membantu masyarakat.

Penelitian Haugh (2014) tentang hubungan kewirausahaan sosial dan perubahan sosial: peran mediasi pemberdayaan, menunjukkan kewirausahaan semakin dianggap sebagai bagian integral pembangunan; namun, norma-norma sosial dan budaya berdampak pada sejauh mana perempuan di negara-negara berkembang terlibat dan menambah manfaat dari aktivitas kewirausahaan. Kewirausahaan sosial emansipatoris sebagai proses yang memberdayakan perempuan dan memberikan kontribusi

untuk mengubah tatanan sosial dimana perempuan itu berada.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat *social entrepreneurship*: kewirausahaan perempuan di Bogor melalui pengolahan kain perca limbah konveksi menjadi aksesoris yaitu terbentuknya wirausaha atau bisnis membuat aksesoris berbahan dasar kain perca limbah konveksi. Kewirausahaan sosial dapat menjadi solusi terhadap peningkatan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan. (Vikaliana dan Andayani 2018).

Banyak ilmuwan sosial percaya bahwa pendukung pengembangan kewirausahaan dalam masyarakat berpenghasilan rendah adalah strategi pembangunan yang layak untuk memerangi kemiskinan. Beberapa bahkan menyarankan agar pembangunan ekonomi menjadi efektif maka bisnis baru di daerah berpenghasilan rendah harus dimulai melalui inisiatif lokal, dan bahwa kewirausahaan merupakan hal yang sangat penting untuk pemeliharaan ekonomi yang sehat. Hal ini digunakan sebagai strategi berbasis masyarakat lokal untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di masyarakat pedesaan (Robinson 2004).

Penelitian tentang Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Jawa Timur, menyoal bagaimanakah kinerja peminjaman dana PPK yang tergabung dalam kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dibandingkan dengan kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Studi ini secara sengaja memilih responden UEP yang berjenis kelamin lelaki, meskipun aturan main PPK mengizinkan UEP beranggotakan perempuan, dan ternyata UEP didominasi oleh kaum lelaki.

Untuk melihat efek jender, kinerja responden UEP ini kemudian dibandingkan dengan responden SPP yang beranggotakan kaum perempuan. Dilihat dari segi produktifitas pinjaman, pinjaman perempuan (SPP) lebih mampu mengentaskan kemiskinan ketimbang pinjaman lelaki (UEP). Hal ini disebabkan 1) Kinerja tunggakan SPP lebih baik ketimbang UEP, dan 2) Pemanfaat dana UEP lebih terbebani utang ketimbang pemanfaatan dana SPP (Suman 2007).

Selain melibatkan perempuan dan masyarakat secara umum, pemberdayaan masyarakat juga sering memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat setempat. Hasil penelitian Kusriani *et al* (2017) tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap Provinsi Kalimantan Barat telah melibatkan tiga kelompok mitra yaitu kelompok ibu-ibu PKK, kelompok pengolahan hasil perikanan dan pemilik usaha gula merah. Dalam rangka mencapai desa mandiri pangan melalui pelaksanaan Desa binaan pada kegiatan Ipteks bagi Desa Mitra (IbDM), pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan telah berhasil meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan mitra IbDM, baik mitra PKK, mitra gula merah dan mitra pengolah ikan.

Selain memanfaatkan potensi sumber daya lokal, pemberdayaan masyarakat juga kerap menggunakan kearifan lokal sebagai bentuk dari strategi konservasi alam. Hasil penelitian Kennedy *et al* (2019) menunjukkan *sasi* sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Maluku Barat Daya (MBD) telah lama

digunakan masyarakat sebagai upaya mempertahankan, melindungi dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. *Sasi* merupakan bentuk kearifan lokal yang harus dipertahankan karena dapat melindungi wilayah dan kelangsungan sumber daya alam. Masyarakat MBD masih tetap berpartisipasi untuk melestarikan kearifan lokal tersebut dengan mempertahankan tradisi *sasi* dan mematuhihinya.

Hasil penelitian Shaladdin bin Muda Wan (2009), tentang analisis kesejahteraan hidup nelayan pesisir menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan hidup nelayan pesisir di daerah Kuala Terengganu masih rendah. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan, terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung yaitu individu nelayan dan kerajaan. Faktor nelayan yang harus diperhatikan dengan serius adalah pendapatan, pendidikan, pemilikan kendaraan, rumah kediaman, simpanan, perbelanjaan dan lokasi tempat kediaman. Dimensi peranan kerajaan juga harus dititikberatkan pada kursus dan latihan, pemasaran, penyelidikan, pembangunan dan prasarana.

Penelitian Glockner *et al* (2004) tentang pemberdayaan masyarakat melalui pemetaan masyarakat untuk air dan sanitasi di Dar es Salaam menunjukkan bahwa pemetaan masyarakat telah membantu LSM, mitra dan masyarakat untuk menyelidiki dan memecahkan masalah yang mempengaruhi daerah termiskin di Dar es Salaam. Fakta dikumpulkan dan disajikan kepada para pembuat keputusan, dan terdapat kesempatan berdialog antara pemerintah dan masyarakat. Proses ini membantu semua orang yang terlibat untuk

merencanakan pekerjaan dengan lebih jelas. Anggota masyarakat merasa diberdayakan untuk mengambil kendali atas hidupnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan makalah, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari komunikasi pembangunan merupakan salah satu strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pencapaian hasil. Selain itu, berbasis entrepreneurship dan penguatan potensi sumber daya alam lokal sehingga menciptakan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan juga melibatkan perempuan dan *stakeholder* dalam masyarakat seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, pemerintah desa dan pihak swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Datta, Punita B, Gailey, Robert. (2012). *Empowering Women Through Social Entrepreneurship: Case Study of a Women's Cooperative in India, Entrepreneurship. Theory and Practice*. 36(3):569-587
- Glockner H, Mkanga M, Ndezi T. (2004). *Local empowerment through community mapping for water and sanitation in Dar*

- es Salaam.
<http://www.sagepublications.com>. *The Community Development Society Journal*. 16(1):185-197.
- Hadiyanto. (2014). *Komunikasi Pembangunan Perspektif Modernisasi*. Bogor: IPB Press.
- Haugh, Talwa HM, Alka. (2014). Linking social entrepreneurship and social change: The mediating role of empowerment. *Business Ethics Journal*. 133(4):643-658.
- Ife, Jim. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman.
- Kennedy P.S.J, Tobing S.J, Lumbantoruan R, Tampubolon E. (2019). Diskusi Tentang Peran Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Sumber Daya Laut dengan Kelompok Masyarakat Maluku Barat Daya. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. 4(1):355-364.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional. Jakarta
- Mardikanto T. (2010). *Komunikasi Pembangunan Acuan Bagi Akademisi, Praktisi dan Peminat Komunikasi Pembangunan*. Surakarta: UNS Press.
- Mudiyono, Marliyantoro O, Sugiyanto. (2005). *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Nugroho TEW. (2005). *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Papilaya EC. (2006). *Akar Penyebab Kemiskinan Menurut Rumahtangga Miskin dan Strategi Penanggulangannya (Kasus di Kota Ambon Propinsi Maluku, dan di Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo)*. : Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Rofiq Aunur. (2014). *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kebijakan dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Republika.
- Robinson, Dassie KL, Wvlin, Christy, Ralph D. (2004). Entrepreneurship and Small Business Development as a Rural Development Strategy. *Southern Rural Sociology*. 20(2):1-23.
- Kusrini N, Sulistiawati R, Imelda, Hurriyani Y. (2017). Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. 2(2):139-150

- Shaladdin M, Amin W. (2009). Analisis kesejahteraan hidup nelayan pesisir. *Jurnal Kemanusiaan*. 8:58-77.
- Suman Agus. (2007). Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro, dan Kemiskinan: Sebuah Studi Empiris. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. 9 (1):62-72.
- Sumodiningrat Gunawan. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarya PO, Sudaryono, Saefullah A. (2011). *Kewirausahaan*. Yogyakarta : Andy Offset.
- Suparlan Parsudi. (1993). *Kemiskinan Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- van de Fliert E. (2014). *Global Handbooks in Media and Communication Research The Handbook of Development Communication and Social Change*. Wilkins KW, Tufte T, Obregon R, editor. West Sussex (UK): Wiley Blackwell.
- Vikaliana R, Andayani A. (2018). *Social Entrepreneurship: Kewirausahaan Perempuan di Bogor melalui Pengolahan Kain Perca Limbah Konveksi menjadi Aksesoris*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. 3(2):323-329.
- Zein A. 2006. Peningkatan Ekonomi Rumah tangga Nelayan Melalui Pemberdayaan Wanita Nelayan. *Jurnal Mangrove dan Pesisir*. 6(1):11-21.